

KEMISKINAN INFORMASI TUNANETRA DI DEWAN PERWAKILAN DAERAH PERTUNI (PERSATUAN TUNANETRA INDONESIA) JAWA TENGAH

Ina Estiaji Mardillah^{*)}, Ana Irhandayaningsih

Program Studi S-1 Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro,
Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia 50275

Abstrak

Penelitian ini berjudul *Kemiskinan Informasi Tunanetra di Dewan Perwakilan Daerah Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) Jawa Tengah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemiskinan informasi tunanetra di Dewan Perwakilan Daerah Pertuni. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pertuni Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Daerah Pertuni Jawa Tengah mengalami kemiskinan informasi. Faktor kemiskinan informasi disebabkan beberapa faktor yakni akses informasi, sosial ekonomi, infrastruktur ekonomi, dan konteks informasi setiap individu.

Kata kunci: informasi; kemiskinan informasi; Pertuni Jawa Tengah

Abstract

[*Title: Information Poverty is to Blind in Regional Representative Council of Pertuni (Indonesian Blind Association) of Central Java*] This research is entitled "Information Poverty is to Blind in Regional Representative Council of Pertuni (Indonesian Blind Association) of Central Java". The purpose of this study was to describe the poverty information is to Blind in the Pertuni Regional Representative Council. This study uses qualitative methods with a case study approach. The method of data collection is done by observation, interviews, literature studies, and documentation. Informants in this study were the Chairperson, Deputy Chairperson, Secretary, Treasurer, and Members of the Central Java Regional Representative Council. The results of this study indicated that the Central Java Regional Representative Council experienced information poverty. Factors inhibiting the fulfillment of information needs are caused by several factors, namely access to information, socio-economic, economic infrastructure, and the context of information for every individual.

Keywords: information; information poverty; Pertuni of Central Java

1. Pendahuluan

Tunanetra berupaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan potensi yang dimiliki, meskipun dengan kesulitan mengubah paradigma di masyarakat. Paradigma masyarakat terhadap tunanetra dipandang sebagai warga negara yang tidak produktif, tidak inovatif dan tidak kreatif, serta merupakan manusia yang lemah mobilitasnya, sehingga ada pembatasan terhadap gerak mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek, baik

nya (Pramudita, 2015: 1).

Tunanetra memiliki kekurangan fisik atau mental yang mengganggu mereka untuk melakukan aktifitas sehari-hari di dalam ruang lingkup masyarakat. Semestinya sebagai warga Negara Indonesia, tunanetra juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga Negara lainnya dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Karena itu peningkatan peran para penyandang disabilitas

netra merupakan upaya penting dalam pembangunan, dan mendapatkan perhatian khusus seperti seharusnya.

Pemerintah sudah berupaya memberikan fasilitas dan layanan untuk pendidikan bagi tunanetra. Hingga saat ini sarana dan upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan kewajibanhukum terhadap kedudukan hak kewajiban dan peran penyandang disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang disabilitas: Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tunanetra juga telah melakukan upaya untuk mengakses informasi demi mengembangkan diri mereka supaya menjadi sosok yang dapat diperhitungkan. Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup tunanetra khususnya disebabkan karena kondisi ketidakberdayaan untuk menjangkau fasilitas umum, atau kelangkaan sistem sumber pelayanan khususnya bagi tunanetra (Pramudita, 2015: 3). Informasi, kini telah menjadi suatu kebutuhan dasar bagi manusia. Informasi menjadi perangkat dasar yang digunakan seseorang untuk mengetahui segala sesuatu dalam hal pengembangan potensi dirinya dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, sudah seharusnya kebebasan mengakses informasi menjadi hak warga Negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28 f yang berbunyi:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia.

Pengasannya juga termuat dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 19 yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.

Apa yang dijabarkan oleh UUD NRI Tahun 1945 dan DUHAM tadi berusaha ditransformasikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hal tersebut termuat dalam pasal 14 Undang-Undang ini, yang diuraikan dalam dua ayat, yaitu:

1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Beberapa aturan undang-undang tersebut jelas menjamin setiap orang dalam mengakses informasi. Tidak melihat yang ada di desa atau kota, baik yang sempurna fisiknya maupun tidak, seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses juga mendapatkan informasi yang sama. Para penyandang disabilitas, khususnya penyandang tunanetra juga seharusnya diberikan kesempatan yang sama sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 4 Pasal 5 tahun 1997 “Setiap penyandang cacat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam setiap aspek kehidupan dan penghidupan”.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi kini semakin terus tak terhentikan. Penemuan-penemuan atas alat dan sistem informasi semakin cepat dan membuat manusia tidak bisa untuk tidak mengikutinya. Buku-buku tebal kini tak memerlukan rak-rak lebar karena buku versi digital atau lebih dikenal dengan *electronic book (ebook)* dapat dengan mudah disimpan sebagai *file* dalam komputer, laptop bahkan *flashdisc* (Rianto 2012: 23).

Perkembangan era digitalisasi berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan informasi bagi tunanetra juga. Sebelumnya tunanetra menggunakan koleksi *braille*, namun karena minimnya koleksi yang dicetak menggunakan huruf *braille*. Dari segi ekonomi dan kepraktisan juga menjadi kendala tersendiri, untuk membeli buku *braille* membutuhkan uang yang tidak sedikit, karena harga buku *braille* jauh lebih mahal dari buku biasa dan lebih tebal dari buku biasa. Sebagai solusi, bahan bacaan untuk tunanetra kini dapat berupa format audio atau biasa disebut dengan buku bicara, atau dalam buku elektronik (*ebook*). Untuk buku bicara, membutuhkan jasa seseorang yang membacakan tulisan di buku normal untuk kemudian direkam dalam bentuk *voice* atau suara. Suara ini kemudian disimpan dalam bentuk kaset atau CD (*compact disc*). Sebenarnya *ebook* sangat membantu tunanetra dalam pencarian informasi, karena praktis dan ekonomis. Namun, tidak banyak penulis dan penerbit yang memproduksi buku dengan versi buku elektronik (Muharam, 2015).

Selain *ebook* yang menjadi pilihan bagi tunanetra, ada pilihan lainnya yaitu komputer atau laptop yang dilengkapinya dengan *software* pembaca layar atau *Screen Reader*. *Software* pembaca layar atau *Screen Reader* yang lazim digunakan oleh tunanetra di Indonesia adalah JAWS (*Jaws Access with Speech*). JAWS adalah brand yang lazim digunakan karena mayoritas pengguna

komputer memakai *Operating System Windows*. Cara kerja dari JAWS pun cukup sederhana. Program ini memang didesain untuk memudahkan tunanetra agar dapat mengoperasikan komputer tanpa bantuan visual. Setiap perintah yang dimasukkan melalui *keyboard* akan dibacakan oleh *software* menjadi bentuk *audio*. Keterbatasan yang dialami oleh tunanetra yaitu kurangnya penglihatan yang dimiliki bila dibandingkan dengan orang normal, membuat tunanetra diduga mengalami kemiskinan informasi. Seperti yang dikatakan oleh Kagan (2000: 28) mengenai ciri-ciri individu atau kelompok yang mengalami kemiskinan informasi ada lima, yaitu:

1. Populasi kurang beruntung secara ekonomi
2. Masyarakat pedesaan yang terisolasi mengalami kurangnya komunikasi dan sistem transportasi
3. Mereka dirugikan oleh kemiskinan budaya dan sosial, terutama yang buta huruf, yang lansia, wanita, dan anak-anak
4. Minoritas yang didiskriminasi oleh ras, keyakinan dan agama
5. Penyandang cacat fisik.

Dari ciri-ciri individu atau kelompok yang mengalami kemiskinan informasi diketahui bahwa salah satu diantaranya adalah penyandang cacat (disabilitas).

DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) Jawa Tengah merupakan organisasi kemasyarakatan tunanetra. DPD Pertuni Jawa Tengah yang mempunyai perpustakaan digital sebagai pemenuh kebutuhan informasi berupa pengetahuan umum, dengan menyediakan berbagai macam koleksi berbentuk *Digital Talking Book*. Koleksi *Digital Talking Book* inilah yang dilayankan kepada tunanetra yang menjadi anggota maupun bukan, dengan harapan pengetahuan yang dimiliki dapat bertambah. Adanya UU hak cipta dan kurangnya kemitraan dengan penerbit atau pihak produsen informasi lain, membuat koleksi yang dimiliki perpustakaan digital DPD Pertuni Jawa Tengah menjadi terbatas, padahal setiap hari selalu ada informasi baru dan ilmu pengetahuan terus berkembang.

Latar belakang yang dipaparkan di atas, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kemiskinan Informasi Tunanetra di Dewan Perwakilan Daerah Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) Jawa Tengah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan pada penelitian ini, bagaimana kemiskinan informasi tunanetra di Dewan Perwakilan Daerah Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) Jawa Tengah terjadi? Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui bagaimana kemiskinan informasi tunanetra di Dewan Perwakilan Daerah Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) Jawa Tengah terjadi.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu jalan atau cara untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala masalah (Subagyo, 2006: 2). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan tersebut digunakan mengingat beberapa hal yang menjadi ciri penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2010 : 8-13) yang menyebutkan beberapa ciri yang ada dalam proses pelaksanaannya, antara lain: berakar pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, menggunakan metode kualitatif, menganalisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dari dasar, dan bersifat deskriptif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. “Penelitian deskriptif mencoba mencari deskripsi yang tepat dan cukup dari semua aktivitas, objek, proses dan manusia” (Sulistyo-Basuki, 2006: 110). Penelitian deskriptif menurut Sulistyo-Basuki ada bermacam-macam, diantaranya adalah penelitian studi kasus. Penelitian Studi kasus adalah bentuk penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan kajian mendalam tentang peristiwa, lingkungan dan situasi tertentu yang memungkinkan mengungkapkan atau memahami suatu hal (Sulistyo-Basuki, 2006: 113).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu sumber data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber pertama (Andi Prastowo, 2011: 204). Sedangkan Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013: 225). Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh bukan dari sumber pertama (Andi Prastowo, 2011: 205). Artinya, data yang diperoleh dalam bentuk dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data sekunder diperoleh dari pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari media elektronik, dan surat kabar, yang telah ada sebelumnya yang berkaitan informasi yang dibutuhkan.

Pada penelitian ini peneliti memilih metode penelitian kualitatif, sebab penelitian dilakukan pada objek yang alamiah. Objek yang alamiah adalah objek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut (Sugiono: 2010: 14-15). Objek dalam penelitian ini adalah kemiskinan informasi di DPD

Pertuni Jawa Tengah. Menurut Bogdan dan Bilken dalam Meleong (2010: 132) subjek adalah orang yang bias memberikan informasi utama yang dibutuhkan untuk penelitian. Agar dalam waktu singkat memberi banyak informasi yang terkumpul sebagai sampling internal karena informan dimanfaatkan untuk bicara, bertukar pikir, atau membandingkan kejadian yang ditentukan. Subjek dalam penelitian ini adalah Tunanetra di DPD Pertuni Jawa Tengah.

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data. Dalam pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan 3 (tiga) metode pengumpulan data seperti berikut ini:

1. Observasi

Nasution (Sugiyono, 2013: 310) menyatakan bahwa observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang objek penelitian dengan cara mengamati-amati dan merekam peristiwa atau situasi (Sulistyo-Basuki, 2006: 148). Penulis menggunakan metode observasi nonpartisipasi, penulis tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan penelitian, melainkan hanya mengamati perilaku yang ditunjukkan oleh informan.

2. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Sangadji, 2010: 151-152). Wawancara dapat membantu peneliti untuk mengetahui bagaimana mengatasi kemiskinan informasi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan informasi yang dilakukan oleh DPD Pertuni Jawa Tengah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur, jadi apabila jawaban yang didapat kurang memuaskan, tidak tepat ataupun tidak lengkap, pewawancara dapat mengajukan pertanyaan lainnya. Informasi yang diperoleh melalui wawancara akan lebih dipercaya kebenarannya karena apabila salah tafsir masih dapat diperbaiki sewaktu wawancara dilakukan.

3. Studi Dokumentasi

Pengambilan rekaman saat wawancara cara dan observasi untuk melengkapi data yang sebelumnya sempat tercatat atau terlewatkan oleh penulis. Studi dokumentasi juga dilakukan untuk memperoleh kriteria informan yang terdaftar sebagai anggota DPD Pertuni Jawa Tengah. Selain itu, tujuan dari studi dokumentasi ini adalah untuk mencari data yang berkaitan dengan subjek penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mencari data dari dokumentasi di DPD Pertuni Jateng mengenai upaya yang dilakukan dalam mengatasi kemiskinan informasi. Dokumen tersebut berupa foto juga dokumen kegiatan dan acara yang dilakukan oleh DPD Pertuni Jawa Tengah. Studi dokumentasi diharapkan dapat memperoleh data untuk subjek dan objek penelitian yang dibutuhkan. Pengolahan data adalah suatu proses yang dilakukan untuk

memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Menurut Miles dan Huberman dalam Herdiansyah (2011). Dalam melakukan pengolahan data terdapat empat tahapan yang harus dilakukan, antara lain:

a. Pengumpulan Data

Pada tahapan ini pengumpulan data untuk penelitian kualitatif bisa dilakukan disaat sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan pada saat akhir penelitian. Sebaiknya proses pengumpulan data ini sudah dilakukan ketika penelitian masih berupa konsep atau *draft*, dengan kata lain ketika penelitian kualitatif baru dimulai. Maksudnya peneliti diharuskan telah melakukan analisis tema pada awal penelitian. Intinya proses pengumpulan data pada penelitian kualitatif ini tidak memiliki waktu tersendiri, melainkan sepanjang waktu penelitian dalam proses pengumpulan data tersebut dilakukan.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (*script*) yang dianalisis, dengan kata lain reduksi data adalah proses perubahan bentuk data dari hasil wawancara, Observasi, dan hasil dari studi pustaka diubah menjadi bentuk tulisan (*script*). Dalam penelitian ini, penulis melakukan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan data yang diperoleh pada saat penelitian mengenai kemiskinan informasi tunanetra, kemudian data yang telah diperoleh tersebut diklasifikasikan serta dipilih secara sederhana agar mempermudah penulis dalam mengolah data tersebut.

c. Display Data

Setelah semua data diubah kedalam bentuk tulisan (*script*), langkah selanjutnya adalah melakukan *Display data*, *Display data* adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam kedalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai dengan tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan, serta akan memecah tema-tema tersebut ke dalam bentuk yang lebih konkret dan sederhana yang disebut dengan subtema yang diakhiri dengan memberikan kode (*coding*) dari subtema tersebut sesuai dengan yang sebelumnya dilakukan yaitu reduksi data.

d. Kesimpulan / Verifikasi

Kesimpulan / Verifikasi merupakan tahapan terakhir dalam rangkaian analisis data penelitian kualitatif. Pada tahapan terakhir ini nantinya akan diambil kesimpulan yang mana kesimpulan ini menjurus kepada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya dan mengungkap "*What*" dan "*How*" dari temuan penelitian tersebut. Pada tahap ini penulis menarik kesimpulan dari data yang telah disimpulkan sebelumnya kemudian melakukan pengecekan ulang dengan mencocokkan dengan data yang dimiliki penulis pada saat penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan observasi objek untuk menentukan fokus penelitian. Hasil yang diperoleh adalah tunanetra di DPD Pertuni Jawa Tengah mengalami “kemiskinan informasi”. Dari Observasi yang dilakukan, peneliti menentukan informan pada penelitian ini berjumlah lima orang, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Informan adalah tunanetra dari anggota aktif DPD Pertuni Jawa Tengah dan telah menjadi pengurus pada organisasi tersebut.
2. Informan adalah orang yang aktif dalam kegiatan yang diadakan oleh DPD Pertuni Jawa Tengah atau pernah mengikuti kegiatan, yang berkaitan dengan mengatasi kemiskinan informasi di DPD Pertuni Jawa Tengah.
3. Informan adalah orang yang aktif memenuhi kebutuhan informasi secara mandiri.
4. Informan adalah tunanetra yang secara mandiri dapat menggunakan media elektronik.

3.1 Informasi

Informasi dibutuhkan tunanetra, karena mereka perlu bersosialisasi dengan orang lain, tidak hanya di ruang lingkup para penyandang tunanetra saja tapi juga lingkungan masyarakat umum. Pentingnya informasi dikatakan oleh Henokh yang berpendapat bahwa teman-teman tunanetra juga butuh informasi seperti yang lain, seperti berita, ilmu pengetahuan, informasi tentang lingkungan sekitar. Informasi yang dibutuhkan tunanetra bermacam-macam, mulai dari informasi ilmiah (jurnal, artikel tentang kesehatan, lingkungan, pendidikan) dan informasi untuk hiburan. Informasi tersebut tergantung pada ketertarikan informan pada suatu hal dan kebutuhan informasi mereka sehari-hari. Tunanetra secara umum membutuhkan informasi terekam, dengan jenis informasi untuk individu, dan tunanetra yang masih bersekolah membutuhkan jenis informasi untuk pelajar dan mahasiswa.

Keragaman bentuk informasi dapat memudahkan pemakai dalam memenuhi kebutuhan informasi. Seperti bagi tunanetra, dalam memperoleh informasi membutuhkan kecanggihan alat yang memudahkan tunanetra dalam mengakses informasi. Dalam penelitian ini peneliti bertanya mengenai sumber informasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi tunanetra. Edi selalu menggunakan internet sebagai sumber informasi, Edi memenuhi kebutuhan informasi mengenai keagamaan dengan menggunakan aplikasi Youtube. Sedangkan Rena menggunakan internet sebagai referensi tugas kuliahnya. Rena mengatakan, “sumbernya dari internet berkaitan dengan mata kuliah, cari referensi untuk tugas kuliah, apa lagi saya kuliahnya jurusan sastra ya mencari novel, buku, cerpen, dari *ebook*. Selain *ebook* juga biasanya dari Youtube untuk mencari menu masakan baru, karena saya suka masak-masakan. Saya juga suka mendengarkan siaran tv,

mencari informasi baru tentang sosial politik”, selain untuk tugas kuliah Rena juga juga memanfaatkan internet sebagai referensi untuk kegemarannya memasak. Rena juga mendengarkan siaran tv, mencari informasi berita baru tentang sosial politik. Informan mengandalkan sumber informasi online, informan memanfaatkan internet sebagai sumber informasi utama.

3.2 Kemiskinan Informasi

Tunanetra di DPD Pertuni Jawa Tengah mengalami kemiskinan informasi. Kemiskinan informasi sama dengan kekurangan informasi, ketimpangan informasi, tidak kebagian informasi, dan kesenjangan informasi. Kemiskinan informasi terjadi karena faktor akses informasi, sosial ekonomi dan infrastruktur informasi, konteks informasi setiap individu.

3.2.1 Akses Informasi

Kemiskinan informasi faktor akses informasi adalah kurang atau tidak adanya akses pada informasi yang penting, dan jika walaupun akses itu tersedia, terjadi ketidakmampuan untuk memanfaatkannya dengan tepat. Untuk mengetahui kemiskinan informasi dari faktor akses informasi pada penyandang tunanetra, peneliti menanyakan akses informasi yang digunakan oleh tunanetra di DPD Pertuni Jawa Tengah. Peneliti menanyakan kemudahan informan dalam memenuhi kebutuhan informasi yang digunakan melalui media cetak atau elektronik (internet). Edi pun menjawab, “Lebih cenderung dengan internet, karena lebih mudah dalam mengakses tinggal ketik apa yang dibutuhkan, menggunakan hp saja, mudah dibawa”. Edi lebih cenderung menggunakan internet, karena mudah dalam mengakses dengan menggunakan gawai yang dimilikinya. Dari pertanyaan yang diajukan, informan menjawab lebih mudah menggunakan media elektronik (internet). Kemudian, untuk mengetahui apakah informan selalu menemukan informasi yang dibutuhkan dari akses informasi yang dilakukan menggunakan media elektronik (internet), peneliti menanyakan hal tersebut. Peneliti juga bertanya kepada informan, tentang apa yang dilakukan informan apabila tidak menemukan informasi yang mereka butuhkan.

Edi menggunakan internet untuk keperluan pribadinya namun untuk informasi organisasi Edi akan bertanya terhadap anggota lainnya. Edi menjawab pertanyaan peneliti dengan jawaban, “Kalau untuk keperluan pribadi biasanya selalu dapat dari internet. Namun untuk keperluan organisasi biasanya komunikasi dari antar organisasi atau anatar teman dari organisasi lain, seperti keperluan untuk keperluan DPD Pertuni saya biasanya berkoordinasi dengan DPD provinsi lain atau Pertuni pusat”. Untuk keperluan organisasi Edi biasanya komunikasi dari antar organisasi atau anatar teman dari organisasi lain, seperti keperluan

untuk keperluan DPD Pertuni saya biasanya berkoordinasi dengan DPD provinsi lain atau Pertuni pusat. Dari pertanyaan yang diajukan peneliti tersebut sebagaimana menjawab selalu menemukan informasi yang dibutuhkan menggunakan internet, sedangkan sebagian informan lainnya akan menggunakan sumber informasi manusia.

Informan dalam penelitian ini biasa menggunakan internet dalam memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan, informan dapat mengakses informasi dari internet menggunakan gawai dan komputer. Karena hal tersebut, peneliti juga bertanya tentang kendala yang dialami oleh informan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Ari mengatakan bahwa ada kendala dalam akses informasi, mencari sumber terpercaya juga sedikit sulit. Kendala lainnya juga dialami oleh Indra dalam melakukan pencarian informasi di Google ketika mengakses gambar, karena tidak bisa terbaca, dan belum adanya aplikasi untuk membaca gambar.

Kendala yang dialami tunanetra bukan hanya sumber informasi dan media yang digunakan, namun kendala dari kemampuan individu sendiri. Seperti yang dialami Rena, “Di perpustakaan kampus kalau sedang mengerjakan skripsi kami biasanya membaca skripsi kakak tingkat, kami yang tunanetra akan kesulitan karena skripsi tersebut menggunakan buku biasa, bukan *braille*. Meminta *ebook* di perpustakaan juga tidak ada, atau tidak diberikan”. Kendala yang dialami Rena dalam mengakses informasi di perpustakaan kampusnya adalah tidak tersedianya literasi dalam bentuk *ebook*, dan literasi untuk mata kuliah yang diajarkan.

Peneliti berkeinginan mengetahui apakah dengan adanya perpustakaan digital DPD Pertuni Jawa Tengah tersebut memudahkan informan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Menurut Rena untuk mencari informasi dari buku bacaan seperti novel, dan ilmu pengetahuan umum maka perpustakaan digital Pertuni membantu memudahkan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Sedangkan menurut Henokh, Perpustakaan digital DPD Pertuni Jawa Tengah sedikit membantu informan dalam memenuhi kebutuhan informasi tentang pengetahuan umum, namun masih perlu pembaruan untuk koleksi dan menambahkan koleksi yang belum lengkap.

3.2.2 Sosial Ekonomi dan Infrastruktur Informasi

Diketahui bahwa produk dan layanan informasi yang dianggap milik semua orang dikomersialkan dengan adanya hak intelektual, hal ini menjadikan informasi tidak gratis, atau harus dibayar juga ingin mendapatkannya. Padahal tidak semua kelompok individu atau populasi memiliki ekonomi yang memadai untuk membeli informasi yang dibutuhkan. Untuk itu peneliti menanyakan kepada

informan tentang pemenuhan kebutuhan informasi, lebih terjangkau (ekonomis) melalui media cetak atau elektronik (internet). Ari mengatakan bahwa, lebih ekonomis menggunakan media elektronik. Edi menambahkan bahwa, “Jelas menggunakan media elektronik, karena lebih murah juga harga paketan internet dari pada buku *braille* yang harganya bisa sampai ratusan ribu meskipun bisa dimaklumi karena bahannya lebih mahal dan prosesnya lebih lama”.

Menurut Edi menggunakan media elektronik, karena lebih murah harga paketan internet dari pada buku *braille* yang harganya sampai ratusan ribu meskipun hal tersebut dapat dimaklumi karena bahan untuk membuat buku *braille* lebih mahal dan prosesnya lebih lama. Dari jawaban yang ditanyakan peneliti tentang pemenuhan kebutuhan informasi, kelima informan sepakat menjawab jika lebih terjangkau (ekonomis) melalui media cetak atau elektronik (internet).

Infrastruktur informasi merupakan badan yang menyebarkan informasi atau produsen informasi, mulai dari perpustakaan, penerbit dan toko buku, distribusi media masa dan jaringan elektronik seperti internet, aplikasi, dan kebijakan pemerintah di bidang informasi. Untuk mengetahui tentang kemiskinan informasi dari faktor infrastruktur informasi yang dialami tunanetra di DPD Pertuni Jawa Tengah, maka peneliti menanyakan Apakah informan pernah membaca *ebook* / *digital book* koleksi dari Perpustakaan Digital DPD Pertuni Jawa Tengah, dan apakah *ebook* / *digital book* yang tersedia sudah memudahkan anda dalam memenuhi kebutuhan informasi. Dari pertanyaan tersebut semua informan menjawab pernah membaca *ebook* / *digital book* koleksi dari Perpustakaan Digital DPD Pertuni Jawa Tengah. Edi mengatakan bahwa, “Saya belum mengoptimalkan nyari info dari DPD kalau disitu saya hanya mencari sesuatu tentang motivasi dan sebagainya jadi belum banyak informasi yang saya butuhkan lewat buku digital”. Edi belum mengoptimalkan pencarian informasi di perpustakaan digital DPD Pertuni Jawa Tengah. Edi memanfaatkan koleksi tentang motivasi, dan belum banyak informasi yang ia butuhkan lewat buku digital. Ia juga mengatakan bahwa koleksi yang ada di perpustakaan digital milik DPD Pertuni adalah koleksi tentang umum. Jika kebutuhan tersebut yang dibutuhkan, maka *ebook* / *digital book* yang tersedia di perpustakaan digital DPD Pertuni sudah memudahkan dalam memenuhi kebutuhan informasi.

Mengenai faktor infrastruktur informasi, peneliti juga menanyakan tentang peran perpustakaan umum sebagai lembaga nirlaba dalam menyediakan informasi bagi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas tunanetra. Namun tidak semua tunanetra pernah datang ke perpustakaan umum. Indra pernah datang ke Perpustakaan, dan mengatakan bahwa perpustakaan wilayah sudah

memiliki komputer untuk tunanetra. Seperti yang dikutip dari jawaban Indra, “Pernah, untuk mengikuti lomba baca *braille*. Sudah lumayan membantu, dari Perwil Jawa Tengah juga sudah membuat komputer untuk tunanetra mencari buku, hal itu tentu membantu tunanetra dalam memenuhi kebutuhan informasinya”. Menurut Indra sudah membantu memenuhi kebutuhan informasi tunanetra, terbukti dengan upaya yang dilakukan Perwil Jawa Tengah dengan menyediakan komputer bicara bagi tunanetra. Meski Perpustakaan Wilayah Jawa Tengah sudah memiliki komputer untuk tunanetra, namun tidak semuanya koleksi tersedia, seperti yang dikatakan Rena, “Pernah, mencari tentang resep-resep masakan yang sudah diterjemah (*braille*) tapi tidak dapat karena tidak ada dalam bentuk *ebook*”.

Peneliti bertanya, “Apakah anda pernah membaca *ebook* / *digital book* yang diterbitkan oleh penerbit? Menurut anda bagaimana penyebaran *ebook* / *digital book* yang diterbitkan?”. Henokh tidak mengalami kendala dalam mencari *ebook*, seperti jawabannya, “Pernah. Kebetulan saya tidak mengalami kendala ketika mencari *ebook* yang dibutuhkan, tapi saya tidak tahu untuk tunanetra lainnya karena kebutuhannya berbeda jadi mungkin perlu diperbanyak koleksi bentuk *ebook* ini”. Menurut Henokh kebutuhan setiap tunanetra berbeda, dan beliau tidak mengetahui kebutuhan tunanetra lainnya. Menurut Ari yang sering membaca *ebook* untuk memenuhi kebutuhan informasi, karena saya juga memberi materi belajar dari *ebook* untuk siswa. Menurut Ari untuk sekarang sudah banyak *ebook* yang tersedia di internet dan mudah diakses, tidak seperti zaman dulu, namun banyaknya *ebook* yang tersedia masih tidak sebanding dengan informasi yang banyak.

Informan yang sering membaca *ebook* selain Ari dan Henokh adalah Rena. Rena mengatakan bahwa, “Pernah, membaca novel dari koleksi Perpus digital Pertuni. Pernah juga novel bentuk *ebook* mencari sendiri untuk tugas kuliah, tapi itu bahasa inggris. Kalau di luar negeri lebih banyak koleksi *ebook*, itu kata kakak tingkat yang tunanetra juga dan pernah ke luar negeri”. Rena mengatakan bahwa membaca *ebook* untuk tugas kuliah, *ebook* tersebut dalam bahasa inggris. Tunanetra lainnya pernah mengatakan kepada Rena bahwa di luar negeri lebih banyak koleksi *ebook* dari pada *ebook* yang diterbitkan di Indonesia. Dari jawaban informan, mengenai pertanyaan peneliti tentang penyebaran *ebook* / *digital book* yang diterbitkan masih kurang. Hal ini karena informasi dan ilmu pengetahuan terus berkembang sedangkan *ebook* / *digital book* masih terbatas. Sedikit dari banyaknya penerbit yang menerbitkan koleksi *ebook* / *digital book*, salah satu penyebabnya adalah karena kendala hak cipta.

Peneliti menanyakan pertanyaan kepada informan tentang kunjungan informan ke toko buku untuk membeli buku *braille* memenuhi kebutuhan

informasinya. Dari ke lima informan, tiga diantaranya menjawab belum pernah ke toko buku. Dua informan lain menjawab, “Pernah, tapi tidak mendapatkan yang dibutuhkan. Sempat lihat-lihat buku *braille* lainnya di toko tersebut dan harganya memang mahal” (Indra). Indra pernah ke toko buku untuk membeli buku *braille*, namun tidak tersedia di toko buku tersebut. Begitu pula Rena, “Pernah ke toko buku, tapi yang dicari tidak ada. Waktu itu saya cari buku resep makanan yang menggunakan buku *braille*, sekalian untuk belajar baca buku *braille*. Sempat menemukan buku cerita juga di situ, untuk harganya ya tiga sampai lima kalinya buku cerita yang bukan tulisan *braille*”. Dari jawaban dua informan yang pernah ke toko buku yaitu Indra dan Rena tidak menemukan kebutuhan informasi yang dibutuhkannya.

Peneliti juga mencari tahu tentang tempat umum yang pernah dikunjungi oleh informan untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka. Peneliti ingin mengetahui apakah tempat umum yang menyediakan informasi bagi masyarakat juga dapat memenuhi kebutuhan informasi tunanetra. berikut jawabannya:

“Iya pernah, di rumah sakit di karena waktu itu kebutuhan saya untuk pengobatan, kalau di rumah sakit bagus dalam memberi informasi untuk orang lain termasuk tunanetra, sarana dan fasilitasnya juga ramah untuk penyandang disabilitas. Selain itu ke masjid untuk ibadah” (Edi).

“Pernah ke PKBI untuk mencari informasi tentang kesehatan reproduksi disabilitas khususnya tunanetra” (Henokh).

Penyandang tunanetra di DPD Pertuni Jawa Tengah mengunjungi tempat umum yaitu rumah sakit, dan poliklinik, untuk mengetahui informasi mengenai kesehatan mata. Mereka secara mandiri mampu datang ke tempat umum tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan, dan mendapat informasi yang dibutuhkan.

Terkait infrastruktur informasi, peneliti juga menanyakan pandangan informan tentang peran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan informasi tunanetra. Jawaban lengkap diungkapkan Edi selaku Ketua DPD Pertuni Jawa Tengah:

“Sebetulnya kalo pemerintah itu yang saya rasakan sudah punya itikat untuk kesana, itu bisa ditandai dengan banyaknya regulasi yang muncul dari UU nomor 8 tahun 2016, kemudian turun ke perda disabilitas, hanya mungkin faktor implementasi dari regulasi itu yang sampe sekarang yang saya rasakan masih dalam tahap diperjuangkan hanya memang masih belum maksimal, karena tidak melibatkan secara total penyandang disabilitas itu sendiri, jadi artinya gini, kami masih terus berupaya untuk menjemput bola, artinya dari pemerintah sendiri belum ada inisiatif yang optimal untuk memberikan informasi atau

mensosialisasi sebuah UU atau peraturan kepada masyarakat. Jadi masih kami yang harus berjuang sendiri agar regulasi itu bisa diterapkan secara menyeluruh” (Edi).

Menurut Edi sudah ada peran dari pemerintah terkait kebutuhan informasi untuk tunanetra ditandai dengan adanya UU nomor 8 tahun 2016. Namun, pada pelaksanaannya penyandang tunanetra secara mandiri memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan informasi. Bahkan pemerintah sendiri belum ada inisiatif yang optimal untuk memberikan informasi atau mensosialisasi undang-undang tersebut tersebut kepada masyarakat.

Tunanetra berupaya memenuhi kebutuhan informasinya, upaya pemenuhan kebutuhan informasi tidak lepas dari infrastruktur informasi. Infrastruktur informasi (badan yang menyebarkan informasi atau produsen informasi) dan konsumen informasi seharusnya berjalan beriringan. Dengan adanya badan penyebaran informasi seharusnya memudahkan tunanetra dalam memenuhi kebutuhan informasi. Namun tunanetra masih terkendala dengan ketersediaan informasi yang dibutuhkan, hal ini menunjukkan bahwa tunanetra mengalami kemiskinan informasi karena faktor ekonomi sosial dan infrakstruktur informasi.

3.2.3 Konteks Informasi Setiap Individu

Faktor konteks informasi individu merupakan salah satu faktor kemiskinan informasi yang dialami individu. Maksudnya orang lain pada konteks atau situasi yang sama mungkin miskin informasi karena ketidak mampuan untuk memahami makna informasi dibandingkan dengan orang lain yang mengalami situasi yang saja ketika itu juga. Peneliti ingin mengetahui faktor konteks informasi individu dari informan dengan mengajukan pertanyaan melalui wawancara.

Untuk mengetahui bahwa tunanetra di DPD Pertuni Jawa Tengah mengalami kemiskinan informasi dari faktor konteks informasi individu, peneliti bertanya kepada informan mengenai bagaimana informan memastikan bahwa informasi yang ditemukan (dari akses informasi yang dilakukan) sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Menurut Henokh sekarang banyak berita bohong yang tersebar, untuk itu harus memastikan bahwa sumber informasinya dapat dipercaya. Henokh mengatakan, “Sekarang ini banyak *hoax* yang beredar, jangankan berita di media sosial, artikel dan tulisan lainnya juga banyak yang tidak mencatumkan sumbernya, jadi kalau itu hal penting seperti tugas kuliah ya memastikan ke teman-teman kuliah. Bertanya tentang sumber informasi yang bisa dipercaya sama teman-teman kuliah”.

Untuk memastikan bahwa informasi yang ditemukan (dari akses informasi yang dilakukan) sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Ari

memilih mencari informasi dari sumber yang terpercaya, “Kalau saya selalu mencari sumber informasi yang terpercaya, dan itu juga didukung oleh sumber lainnya, jadi tidak hanya satu sumber saja. Harus ada informasi yang mendukung terkait hal tersebut”. Ari mengaku selalu mencari sumber informasi yang terpercaya, dan didukung oleh sumber lainnya, tidak hanya dari satu sumber. Untuk memastikan bahwa informasi yang ditemukan (dari akses informasi yang dilakukan) sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh tunanetra maka berbagai cara dilakukan seperti bertanya kepada orang lain, atau dengan mencari informasi dari sumber informasi yang berbeda.

Peneliti ingin mengetahui apakah informan pernah mengalami perbedaan informasi dengan orang lain, dan bagaimana cara informan menanggapi hal tersebut. Edi menjawab:

“Pernah, bahkan sering, kalau itu terkait hal-hal penting ya saya tanyakan orang itu sumber informasinya dari mana, sumber tersebut bisa dipercaya atau tidak, dan sejauh mana orang itu tahu tentang informasi tersebut, begitu pula sebaliknya saya juga memberitahu ke orang tersebut informasi yang saya miliki, lalu cari tahu tentang informasi yang sebenarnya itu bagaimana sebagai jalan keluarnya. Kalau informasi yang dirasa kurang penting atau hiburan ya saya biasanya diam saja” (Edi).

Edi mengatakan untuk hal-hal penting Edi menanyakan pada orang yang berbeda informasi dengannya, yaitu sumber informasi yang didapatkan orang lain tersebut dapat dipercaya atau tidak, dan pemahaman orang tersebut tentang informasi diperoleh. Edi juga akan memberitahu ke orang tersebut tentang informasi yang ia miliki, kemudian mencari informasi yang benar sebagai jalan keluar dari perbedaan pendapat tersebut.

Informan dalam penelitian ini merupakan pengurus DPD Pertuni Jawa Tengah, untuk itu peneliti ingin mengetahui apakah informan pernah mengalami perbedaan pendapat dengan pengurus lainnya dalam organisasi, dan bagaimana informan menanggapi hal dengan musyawarah sampai sepakat bersama. Ari yang pernah mengalami perbedaan pendapat dengan anggota lain di DPD Pertuni Jawa Tengah juga mengatakan, “Pernah, biasanya dengan musyawarah kalau rapat di DPD Pertuni Jawa Tengah, pendapat tersebut harus sesuai kebutuhan organisasi. Kalau ada pendapat pengurus lain yang lebih solutif, ya tidak perlu memaksakan diri kalau pendapatnya paling benar”. Jawaban Ari menjelaskan jika pendapat dari anggota harus sesuai kebutuhan organisasi di DPD Pertuni Jawa Tengah, dengan pendapat yang solutif dari anggota organisasi. Edi sebagai ketua DPD Pertuni Jawa Tengah menjelaskan,

“Tentu pernah, karena kami di DPD Pertuni Jateng ini menggunakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama, jadi semua

diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Tentunya pendapat anggota dengan pertimbangannya asing-masing, pertimbangan tersebut juga dilihat dari faktor kesulitan, kemudahan, kekurangan, dan kelebihannya. Maka harus mendengarkan pendapat pengurus lainnya, supaya tidak ego untuk mencapai mufakat bersama” (Edi).

Menurut Edi, di DPD Pertuni Jawa Tengah menggunakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama, semua anggota DPD Pertuni Jawa Tengah diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Pendapat anggota yang dikemukakan sesuai dengan pertimbangan, pertimbangan tersebut dilihat dari faktor kesulitan, kemudahan, kekurangan, dan kelebihannya. Maka harus mendengarkan pendapat pengurus lainnya, supaya tidak mementingkan kepentingan individu untuk mencapai mufakat bersama.

3.2.4 Upaya dan Hambatan

Sebagai organisasi, DPD Pertuni Jawa Tengah melakukan upaya untuk meningkatkan SDM anggotanya supaya tidak dipandang sebelah mata, karena kekurangan penglihatan yang dimiliki. Seperti yang dikatakan oleh Edi sebagai ketua di DPD Pertuni Jawa Tengah:

“DPD Pertuni Jawa Tengah memiliki kegiatan dalam bidang komputer bicara bagi tunanetra, seperti pelatihan, dan seminar komputer bicara bagi tunanetra. Kegiatan ini tujuannya supaya tunanetra bisa secara mandiri mengakses informasi yang dibutuhkan dan tidak bergantung dengan orang lain untuk mengetahui informasi apapun dizaman yang sangat modern ini. DPD Pertuni Jateng juga memiliki perpustakaan digital yang dapat digunakan oleh tunanetra supaya menjadi SDM yang dapat diperhitungkan” (Edi).

Dari jawaban Edi, dijelaskan bahwa DPD Pertuni Jawa Tengah memiliki kegiatan dalam bidang komputer bicara bagi tunanetra, kegiatan tersebut berupa pelatihan, dan seminar komputer bicara bagi tunanetra. Kegiatan komputer bicara bagi tunanetra bertujuan supaya tunanetra bisa secara mandiri mengakses informasi yang dibutuhkan dan tidak bergantung kepada orang lain. DPD Pertuni Jateng juga memiliki perpustakaan digital yang dapat digunakan oleh tunanetra, dengan adanya perpustakaan digital tersebut diharapkan supaya tunanetra menjadi SDM yang dapat diperhitungkan.

Upaya yang dilakukan DPD Pertuni Jawa Tengah dalam mengurangi kemiskinan informasi tunanetra menurut Henokh salah satunya adalah dengan adanya perpustakaan digital. Seperti yang dikutip dari jawaban Henokh berikut, “DPD Pertuni Jawa Tengah memiliki perpustakaan digital. Selain perpustakaan digital juga mengadakan pelatihan komputer bagi tunanetra”. Ari menjawab upaya

yang dilakukan DPD Pertuni Jawa Tengah, dengan jawaban berikut,

“Yang dilakukan oleh DPD Pertuni Jawa Tengah adalah menyediakan kegiatan komputer bagi tunanetra, kegiatan ini difasilitasi oleh DPD Pertuni Jateng dengan memberikan pelatih dan pesertanya adalah perwakilan tunanetra dari kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Peserta pelatihan ini kemudian akan melatih tunanetra yang ada di kabupaten dan kotanya masing-masing. Karena kemudahan untuk mencari informasi diinternet, tunanetra juga tidak boleh kalah dalam hal ini” (Ari).

Ari mengatakan jika DPD Pertuni Jawa Tengah menyediakan kegiatan komputer bagi tunanetra, yang difasilitasi oleh DPD Pertuni Jawa Tengah dengan memberikan pelatih dan pesertanya adalah perwakilan tunanetra dari kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Peserta pelatihan ini kemudian akan melatih tunanetra yang ada di kabupaten dan kotanya masing-masing.

Dari jawaban informan diketahui bahwa, DPD Pertuni Jawa Tengah memiliki kegiatan dalam bidang komputer bicara bagi tunanetra, yaitu pelatihan komputer, dan seminar komputer bicara bagi tunanetra. Kegiatan ini tujuannya supaya tunanetra bisa secara mandiri mengakses informasi yang dibutuhkan dan tidak bergantung dengan orang lain untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan oleh tunanetra. DPD Pertuni Jateng juga memiliki perpustakaan digital yang dapat digunakan oleh tunanetra supaya menjadi SDM yang dapat diperhitungkan.

Informan dalam penelitian ini adalah pengurus DPD Pertuni Jawa Tengah. Berdirinya perpustakaan digital Pertuni, adalah salah satu upaya yang dilakukan dan masih berjalan hingga kini. Selain perpustakaan digital Pertuni, DPD Pertuni Jawa Tengah juga mengajarkan komputer pada tunanetra. Namun, jika dilihat dari profil DPD Pertuni Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir kegiatan yang dilakukan DPD Pertuni Jawa Tengah semakin berkurang. Untuk itu peneliti ingin mengetahui kendala yang dihadapi dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi tunanetra di DPD Pertuni Jawa Tengah.

Pendapat Ari, “Banyak tunanetra yang belum bisa teknologi dan digital, sehingga tertinggal”. Menurut Ari banyak tunanetra yang belum memiliki kemampuan teknologi dan digital, sehingga membuat tunanetra tertinggal. Pendapat yang berbeda dikatakan oleh Indra, “Kurangnya perhatian dari pemerintah mengenai penyandang disabilitas. Padahal seharusnya pemerintah memudahkan aksesnya dengan adanya DPD Petuni Jawa Tengah”. Indra beranggapan bahwa pemerintah kurang memperhatikan penyandang disabilitas, padahal penyandang disabilitas tunanetra sudah memiliki ruang yaitu DPD Petuni Jawa Tengah, hal ini akan

memudahkan pemerintah dalam menyalurkan perhatiannya.

Jawaban lebih lengkap tentang kendala yang dialami DPD Pertuni Jawa Tengah dalam memenuhi kebutuhan informasi tunanetra dikatakan oleh Edi, sebagai ketua di DPD Pertuni Jawa Tengah:

“Dari internal DPD Pertuni, Keterbatasan SDM dan kemauan tunanetra untuk mengembangkan diri secara optimal. Dari pihak eksternal, keterbatasan jaringan kemitraan dan keterbatasan dana kegiatan terkait dengan informasi untuk tunanetra, seperti sarana prasarana yang belum memadai untuk memenuhi informasi di sini. Perpustakaan digital juga tidak digunakan maksimal, untuk menambah koleksi juga sulit terkait UU hak cipta, penerbit buku enggan untuk menyumbangkan koleksinya secara *ebook* karena tidak menguntungkan penerbit tersebut. Pemerintah provinsi sekarang juga susah diajak bekerjasama.” (Edi)

Menurut Edi kendala yang dialami datang dari internal DPD Pertuni, yaitu keterbatasan SDM dan kemauan tunanetra untuk mengembangkan diri secara optimal. Sedangkan kendala eksternal, keterbatasan jaringan kemitraan dan keterbatasan dana kegiatan yang berkaitan dengan informasi tunanetra. Perpustakaan digital Pertuni tidak digunakan maksimal. Menambah koleksi di Perpustakaan digital Pertuni yang sulit karena undang-undang hak cipta, penerbit buku tidak mau menyumbangkan bukunya dan diubah dalam bentuk *ebook* dengan alasan tidak menguntungkan penerbit tersebut. Pemerintah provinsi sulit untuk diajak bekerjasama dengan DPD Pertuni Jawa Tengah.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti berkesimpulan bahwa:

1. Kemiskinan informasi yang dialami para penyandang tunanetra di DPD Pertuni Jawa Tengah disebabkan beberapa faktor Akses informasi, Sosial ekonomi dan infrastruktur informasi:
2. Akses informasi: kemampuan mengakses informasi penyandang disabilitas tunanetra masih kurang seperti tunanetra dewasa kurang memiliki kemampuan dalam membaca buku *braille* maupun penggunaan media elektronik, belum tersedianya aplikasi yang mendukung untuk digunakan membaca dari data informasi tertentu seperti gambar, adanya perpustakaan digital milik DPD Pertuni Jawa Tengah belum memenuhi kebutuhan informasi tunanetra, dan tunanetra masih memerlukan bantuan orang lain memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan.
3. Sosial ekonomi dan infrastruktur informasi: mahal nya harga buku *braille* dan sulitnya

mencari koleksi dalam bentuk buku *braille*, penyebaran koleksi dalam bentuk *ebook* dari penerbit terbatas karena *ebook* mudah untuk gandakan, informasi mengenai komputer bicara di perpustakaan umum tidak sampai pada tunanetra, pemerintah dirasa kurang memenuhi kebutuhan informasi bagi tunanetra.

4. Tunanetra di DPD Pertuni Jawa Tengah tidak mengalami kemiskinan informasi dari faktor konteks informasi setiap individu, karena tunanetra di DPD Pertuni Jawa Tengah memahami kebutuhan informasinya masing-masing, dan dapat menyelesaikan kendala yang dialami terkait kebutuhan informasi yang dibutuhkan.
5. Upaya yang dilakukan DPD Pertuni Jawa Tengah dalam menghadapi kemiskinan informasi tunanetra dilakukan dengan cara melakukan pelatihan komputer bagi tunanetra, dan menyediakan perpustakaan digital di DPD Pertuni Jawa Tengah.
6. Hambatan/kendala yang dialami oleh DPD Pertuni Jawa Tengah dalam menghadapi kemiskinan informasi tunanetra adalah terbatasnya sumber daya manusia (SDM) dalam keanggotaan organisasi di DPD Pertuni Jawa Tengah, sarana prasarana yang belum memadai, kesadaran dari penyandang tunanetra untuk mencari informasi, keterbatasan jaringan kemitraan dan keterbatasan dana kegiatan, kurangnya pemanfaatan perpustakaan digital DPD Pertuni Jawa Tengah oleh tunanetra, dan sulitnya menambah koleksi di perpustakaan digital DPD Pertuni Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kagan, A. (2000), “The growing gap between the information rich and the information poor both within countries and between countries: a composite policy paper”, IFLA Journal, Vol. 26 No. 1, pp. 28-33.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muharam, Dimas Prasetyo. 2015. *Tunanetra dan Buku Elektronik*. <<http://www.kartunet.com/tunanetra-buku-elektronik-8900/>> diakses [17 November 2016].
- Pramudita, Nadyan. 2015. “Pemberdayaan Penyandang Tunanetra Melalui Pendekatan Pendidikan Non Formal”. Semarang: Fakultas Ilmu Pendidikan, Unnes.

- Prastowo, Andi. 2011. *Memahami Metode-metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rianto, puji dkk. 2012. *Digitalisasi Televisi di Indonesia: Ekonomi Politik, Peta Persoalan, dan Rekomendasi Kebijakan*. Yogyakarta: PR2Media dan Yayasan Tifa.
- Sangadji, Etta Mamang. 2010. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi.
- Subagyo, P. Joko. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Penerbit Rineka Cipta. Cetakaan ke -5. Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi(Mixed Methode)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyo- Basuki. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Widya Sastra.